



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

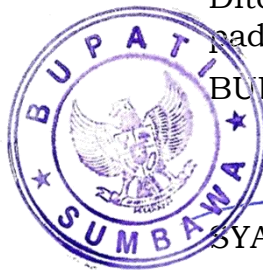
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 107

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai pihak dan unsur, dalam perencanaan pembangunan diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang baik dan efektif, karena hal ini merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra PD pun bersifat fleksibel dan dapat dirubah, apabila RPJMD mengalami perubahan, sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi

PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Salah satu PD dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD pada pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan, dan bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan serta menjaga stabilitas politik, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah tersebut diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, dimana Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, telah mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) untuk merencanakan pembangunan lima tahun ke depan. Rencana Strategis yang disingkat Renstra adalah suatu Dokumen perencanaan yang tertoleransi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 Tahun kedepan. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. Penyusunan Renstra mempertimbangkan potensi dan masalah serta isu strategis pembangunan. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah yang

komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen Renstra ini merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa capaian kinerja, baik indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK), serta indikator kinerja lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik, yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik selama kurun waktu tahun 2025-2029. Disamping itu, agar penyelenggaraan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berjalan dengan sesuai harapan, maka penyusunan restra harus dapat bersinergi dengan pembangunan nasional dengan memperhatikan restra Kesbagpoldagri Provinsi NTB. Adapun fungsi Renstra adalah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam kurun waktu 1 s/d 5 Tahun, apabila hal ini dijalankan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena indikator tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa adalah tingkat pecegahan konflik sosial dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, dengan tidak adanya konflik sosial yang terjadi maka terwujudlah kodisifitas wilayah yang aman dan damai serta jauh dari koflik sosial, hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dari peningkatan iklim investasi dan pengembangan dunia industri, dengan begitu, peluang kerja lebih luas dan banyak bagi masyarakat, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum adalah peraturan atau dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tertentu, landasan hukum berarti peraturan yang melandasi atau menjadi dasar dalam suatu kegiatan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat/merupakan ladsan hukum yang berlaku. Adapun Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, disusun berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku, sebagai dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

26. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa memiliki maksud dan tujuan, hal ini sesuai Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai

dengan tugas dan fungsi PD, serta menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD. Adapun maksud dan tujuan yang terperinci adalah:

1. Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah:
 - a. Sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam menyusun program dan kegiatan dalam pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun kedepan;
 - b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam perencanaan jangka menengah;
 - c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang transparan dan akuntabel.
2. Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah :
 - a. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.3. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu:

- 1.1. Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra;

- 1.2. Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029;
- 1.3. Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- 1.4. Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut:

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontent pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENG-GARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah organisasi pembantu kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perangkat daerah dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, dan fungsinya pada bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta ketahanan ekonomi sosial budaya. Untuk melaksanakan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
3. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 4 (empat) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

- 1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
- 2. Terdapat 3 (tiga) Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Ideolgi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi Ssial Budaya dan Agama .
 - b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penagan Konflik.

Bidang-bidang tersebut diatas, di kepalai oleh Kepala Bidang yang disigkat dengan sebutan Kabid dan dibawahnya terdiri dari eselon IV, baik fungsional maupun struktural dan staf, untuk lebih jelasnya mengenai uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa disajikan pada Data Tabel 2.1 dibawah ini:

Data Tabel 2.1
Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Badan	Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik	a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta

Jabatan	Tugas	Fungsi
		pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sekretaris	Memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut: a. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; - c.mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; d. mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; f. menyiapkan bahan penyusun rencana strategis Badan; g. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan	a. pengoordinasian dalam penyusunan program dan anggaran; b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset; e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan	Tugas	Fungsi
	program dan kegiatan Badan; h. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan; i. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; j. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; k. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan; l. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; m. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta	a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,

Jabatan	Tugas	Fungsi
	pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.	pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya c. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

Jabatan	Tugas	Fungsi
		e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
Kepala Bidang Kewaspadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi	a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

Jabatan	Tugas	Fungsi
	kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.	kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi

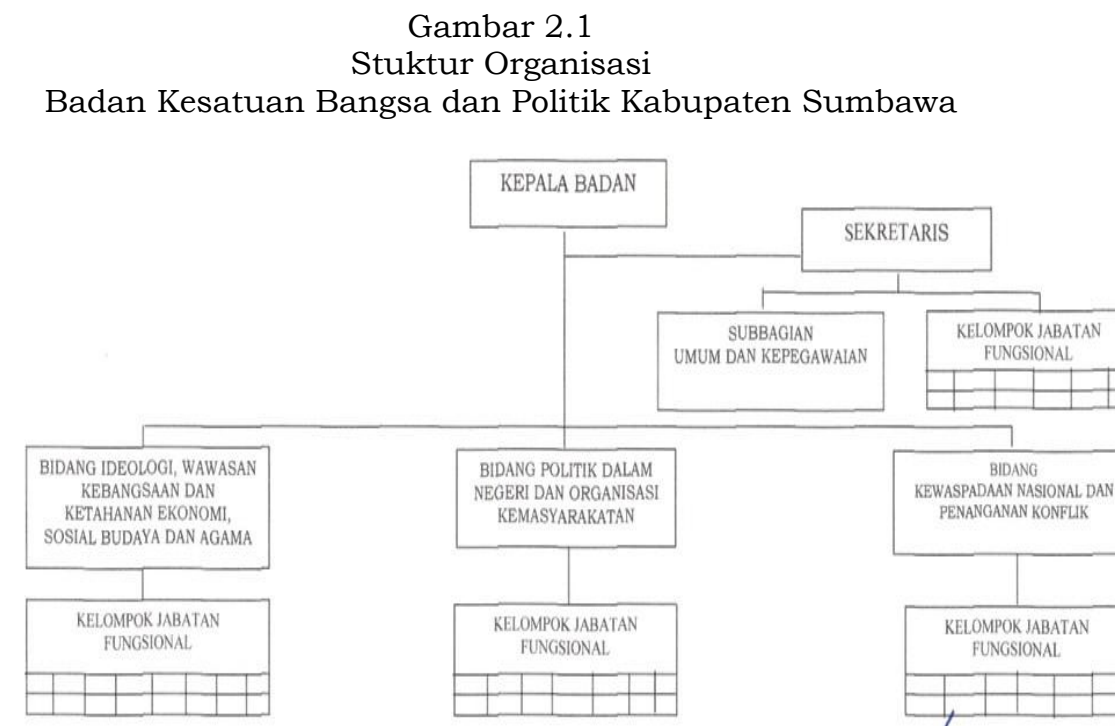
Jabatan	Tugas	Fungsi
		kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi merupakan suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup organisasi tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menurut Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan gambaran dari Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. dapat dilihat pada Gambar

2.1 Struktur Organisasi sebagai berikut:



2.1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, aset/modal, dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada bidang kesatuan bangsa dan politik.

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesbangpol terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honorar). Karakteristik pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa disajikan pada Data Tabel 2.2 berikut ini:

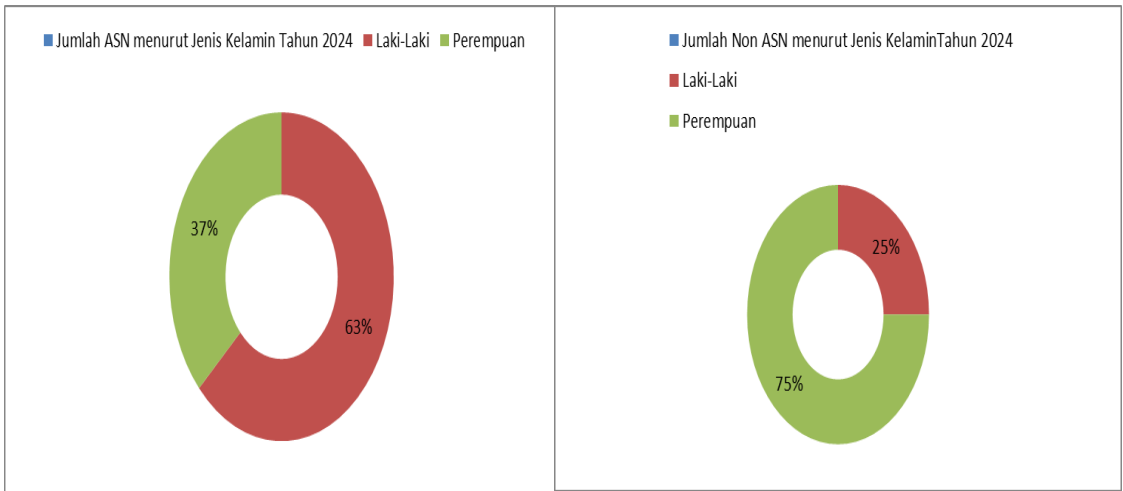
Data Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020-2024.

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN	18	19	18	17	18
2.	Jumlah PPPK	0	0	0	1	1
3.	Jumlah Pegawai Non ASN	4	4	4	4	4
	TOTAL	22	23	22	21	23
3.	Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	14	15	14	14	12
	Perempuan	4	4	4	4	7
4.	Jumlah Non-ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	1	1	1	1	1
	Perempuan	3	3	3	3	3
5.	Jumlah Pegawai ASN menurut Umur:					
	Usia 25-29 tahun	0	0	0	0	0
	Usia 30-34 tahun	0	0	0	0	0
	Usia 35-39 tahun	3	3	1	0	0
	Usia 40-44 tahun	4	1	3	5	6
	Usia 45-49 tahun	6	4	1	2	2
	Usia 50-54 tahun	3	5	9	9	7
	Usia 55-59 tahun	6	6	4	2	4

Berdasarkan tabel 2.2, Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam 5 Tahun terakhir (2020-2024) terdiri atas pegawai ASN sekitar 83 persen dan Non ASN 17 persen. tampak bahwa pegawai non ASN memiliki proporsi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin,

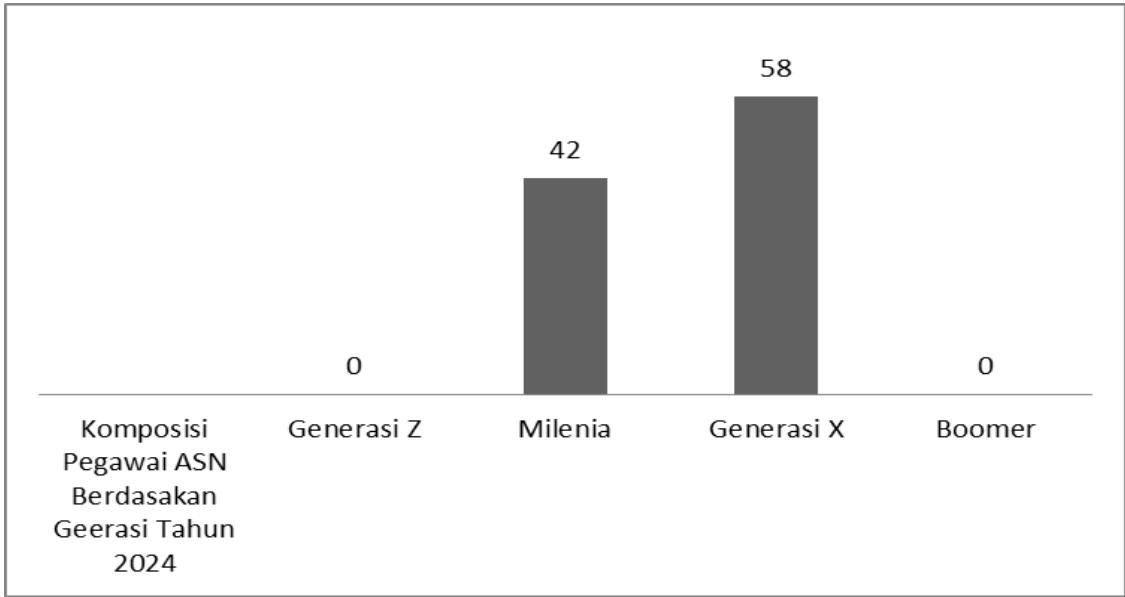
menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan. Data terakhir tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai ASN dan Non-ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2024



Dari sisi umur, SDM ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, proporsi terbesar berada pada usia 50-54 tahun atau 37 persen. Sedangkan usia 40-44 tahun sebesar 32 persen, usia 30-34 tahun sebesar 0 persen, usia 35-39 tahun sebesar 0 persen, usia 45-49 tahun sebesar 11 persen, dan usia 56-59 tahun sebesar 21 persen. Menurut level generasi, pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 didominasi oleh generasi X (lahir tahun 1965-1980) sebesar 58 persen. Komposisi generasi lainnya yaitu generasi Milenial (lahir tahun 1980-1996) sebesar 42 persen. Keadaan tersebut disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai ASN dan PPPK Berdasarkan Generasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2024



Kualifikasi pendidikan ASN (PNS dan PPPK) dan non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, disajikan pada Data Tabel 2.3 berikut ini:

Data Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan:	18	19	18	18	19
	SMA Sederajat	4	4	4	3	3
	Diploma (D1-D3)	2	2	2	2	2
	S1	10	11	11	10	11
	S2	2	2	2	3	3
	S3	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Pegawai No-ASN Berdasarkan Pendidikan:	4	4	4	4	4
	SLTP	1	1	1	1	1
	SMA Sederajat	1	1	1	1	1
	Diploma (D1-D3)	0	0	0	0	0
	S1	2	2	2	2	2
	S2	0	0	0	0	0
	S3	0	0	0	0	0

Berdasarkan Data Tabel 2.3 diatas, bahwa data lima tahun terakhir, diketahui komposisi tingkat pendidikan pegawai negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, baik ASN maupun non ASN, paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu lebih dari 45 persen, dan sumber ini merupakan potensial dalam menggerakan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Pada Tahun 2024, jumlah pegawai 19 orang ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK dengan komposisi S1 mencapai 57%, selanjutnya S2 sebesar 16%, D3 sebesar 11% dan SMA sebesar 16%. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga didukung oleh 4 orang tenaga NON-ASN (Honorar) dengan komposisi S1 mencapai 50%, SMA sebesar 5% dan 5% nya lagi lulusan SLTP. Untuk data kepegawaian yaitu berdasarkan unit kerja bidang pada perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa per 31 Desember Tahun 2024 dan pada bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan pegawai terbanyak serta lebih jelasnya disajikan pada Data Tabel 2.4 berikut ini:

Data Tabel 2.4
SDM Berdasarkan Bidang/Unit Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2024

No	Bidang/Unit Kerja	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah Tenaga Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	Sekretariat	7	4	11
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	4	0	4
3	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	5	0	5
4	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	3	0	3
Jumlah		19	4	23

2.1.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Selain sumberdaya manusia yang memadai dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, aset/modal juga merupakan sarana dan prasarana yang ikut mendukung. Adapun pengertian dari aset, dalam konteks akuntansi dan keuangan, adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset bisa berupa uang tunai, harta berwujud seperti bangunan dan kendaraan, atau hak-hak yang tidak berwujud seperti hak paten atau merek dagang. Dari pengertian tersebut bahwa aset merupakan hal ini sangat penting untuk mendukung aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat. Adapun jumlah sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Per 31 Desember 2024, dari hasil konfirmasi pemeriksaan LKPD berupa aset yang dimiliki, Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris tanah disajikan pada Data Tabel 2.5 berikut ini:

Data Tabel 2.5
Daftar Inventaris Tanah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020 - 2024

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang Tanah	Bidang	1	1	1	1	1
2	Luas Bidang Tanah	M2	259.840	259.840	259.840	259.840	259.840

Data diatas merupakan sebidang tanah yang difungsikan sebagai tempat berdirinya bangunan gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dan beralamat di Jalan Bungur NO 2 Labuhan Badas Sumbawa Besar, yang diperoleh pada tahun 1996 dan masih digunakan sampai saat ini, selain data aset diatas, ada juga aset tentang peralatan dan mesin yang di miliki dan digunakan sebagai sarana operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, adapun sarana tersebut tersaji pada Data Tabel 2.6 dibawah ini :

Data Tabel 2.6
Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020 - 2024

No	Type>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mbil Station wagon Isuzu/ TBR 541	Unit	1	1	1	1	1
2	Mbil Station Wagon Toyota Avanza veloz	Unit	1	1	1	1	1
3	Sepeda Motor Kawasaki / SPM R 2	Unit	1	1	1	1	1
4	Sepeda Motor Kawasaki / SPM R 2	Unit	1	1	1	1	1
5	Lemari Besi/ Metal	Buah	1	1	1	1	1
6	Lemari Besi/ Metal 4 Pintu 2 Laci	Buah	1	1	1	1	1
7	Lemari Besi/ Metal/Importa	Buah	1	1	0	0	1
8	Lemari Besi/ Metal/Importa	Buah	1	1	1	1	1
9	Brangkas Okida/DS 804 A	Buah	0	0	0	0	1
10	Papan Visual / Papan Nama	Buah	1	1	1	1	1
11	Papan Visual / Papan Nama	Buah	1	1	1	1	1
12	Papan Struktur	Buah	1	1	1	1	1
13	Proyektor Infocos	Unit	1	1	1	1	1
14	Meja Podium	Buah	1	1	1	1	1
15	Kursi Tunggu/ Importa	Set	1	1	1	1	1

No	Type>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Kursi Lokal / Ukiran	Set	1	1	1	1	1
17	Kursi Kayu / Lokal	Set	1	1	1	1	1
18	Lemari Es / Sarp Lemon	Unit	1	1	1	1	1
19	AC Window / Toshiba/standar 1,5	Unit	1	0	0	0	1
20	AC Split / LG	Unit	1	1	1	1	1
21	AC Split / LG/standar 1,5	Unit	1	1	0	0	1
22	AC Split / Polytron/1 pk	Unit	3	3	3	3	3
23	TV Sharf	Unit	1	1	1	1	1
24	Monitor Audio/MA	Unit	1	1	1	1	1
25	Meja Setengah Biro	Buah	6	6	6	6	6
26	Tera K.b / Black	Unit	1	1	1	1	1
27	Lokal/Goyang Busa+Besi	Buah	3	3	3	3	3
28	Lokal/Goyang + Putar	Buah	1	1	1	1	1
29	Lokal/Goyang + Putar	Buah	1	1	1	1	1
30	Lokal/Goyang + Putar	Buah	1	1	1	1	1
31	Lokal + Busa	Buah	9	9	9	9	9
32	Anaka	Buah	1	1	1	1	1
33	Panasonik	Unit	1	1	1	1	1
34	Acer All in One	Unit	1	1	1	1	1
35	MYPC ONE PRO / N5 (8N5)	Unit	1	1	1	1	1
36	Asus X441UB (i3)	Unit	4	4	4	4	4
37	Asus X451CAP/	Unit	1	1	1	1	1
38	Asus	Unit	1	1	1	1	1
39	Asus/Persegi	Unit	1	1	1	1	1
40	Acer Aspire ES II	Unit	1	1	1	1	1
41	ASUS VIVO BOOK	Unit	1	1	1	1	1
42	ASUS VIVO BOOK	Unit	1	1	1	1	1
43	ASUS VIVO BOOK	Unit	1	1	1	1	1
44	Asus	Unit	1	1	1	1	1
45	HP Desk Jet /2135	Unit	2	2	2	2	2
46	Epson L360/Scan	Unit	1	1	1	1	1
47	Epson L3110/Persegi	Unit	1	1	1	1	1
48	Epson L3110	Unit	1	1	1	1	1
49	Epson L3110/Persegi	Unit	3	3	3	3	3

No	Type>Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
50	Epson L3250/All In One	Unit	1	1	1	1	1
51	Epson L3256	Unit	2	2	2	2	2
52	Plustek/Persegi	Unit	1	1	1	1	1
53	ADF/Size A3	Unit	1	1	1	1	1

Data diatas merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki, perolehan dibawah tahun 2020 telah mengalami penyusutan barang dan perlu dilakukan penghapusan barang, terutama barang berupa Komputer PC, Laptop,Printer yang dalam status rusak berat dan juga ada yang dalam kondisi rusak ringan, selain inventaris Tanah, peralatan dan mesin, ada juga barang inventaris berupa bangunan dan gedung yang diperoleh dari tahun 2020 sampai dengan 2024, dan untuk lebih jelasnya, tentang daftar inventaris bangunan dan gedung disajikan pada Data Tabel 2.7 dibawah ini:

Data Tabel 2.7
Daftar Inventaris Bangunan/gedung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020 - 2024

No	Nama Barang	Satuan	Luas BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
2	Gedung Pos Jaga Permanen	M2	550x500	550x500	550x500	550x500	550x500
3	Taman Permanen	M2	260	260	260	260	260
4	Pagar Permanen	M2	1000x2000	1000x2000	1000x2000	1000x2000	1000x2000
5	Pagar Permanen	M2	28,10x2	28,10x2	28,10x2	28,10x2	28,10x2

Pada data diatas merupakan data yang diperoleh dari Kartu Inventaris Barang Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, dimana gedung pos jaga permanen dan pagar keliling seluas 1000x2000 M2 berlokasi di Kecamatan Lunyuk, selebihnya yaitu Bangunan gedung kantor permanen, taman permanen dan pagar permanen berada pada kantor Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merujuk pada tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja ini diukur melalui berbagai indikator kinerja.

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

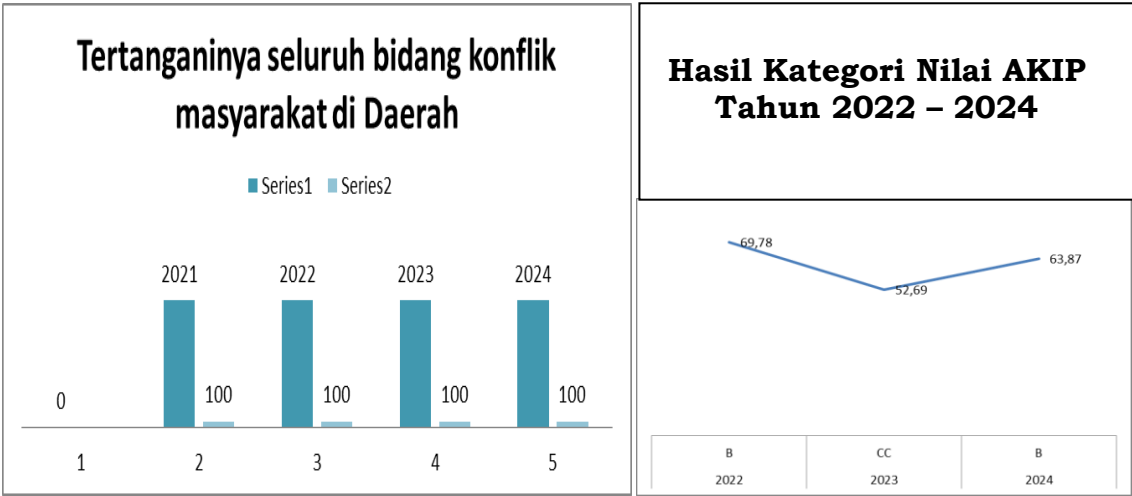
Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut.

Data Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Tertanganinya seluruh bidang konflik masyarakat di Daerah	%	100	100	100	100
2	Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori	B	B	CC	B

Dari data 2.8 diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020-2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa untuk indikator teknis rata-rata 100% dan mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi pada kategori predikat hasil evaluasi Akip memiliki nilai/predikat yang bervariasi dan fluktuatif, dimana pada tahun 2021 dan 2022 berkategori B dan tahun 2023 turun ke kategori CC dan pada tahun 2024 naik ke kategori B, capaian indikator IKU disajikan berupa gambar grafik dibawah ini:

Gambar 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2024



Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tertanganinya seluruh bidang konflik masyarakat di Daerah
Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dimana yang berkaitan dengan kategori konflik di daerah yaitu pada kabupaten sumbawa dapat ditangani dengan baik sehingga tidak memicu terjadinya konflik yang lebih besar.

Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP Badan Kesbangpol
Untuk sasaran Meningkatnya Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, dengan Kategori Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yaitu dinilai dan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) di setiap tahunnya, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa berdasarkan LHE tersebut, memiliki nilai/predikat yang bervariasi dan fluktuatif, dimana Pada tahun pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 berkategori B dengan nilai yang sama yaitu 69,78 dan tahun 2023 capaian meurun dengan kategori CC pada nilai 52,69 dan tahun 2024 naik menjadi kategorir B dengan nilai 63,87 hal ini menandakan bahwa adanya kenaikan, walaupun tidak menonjol. sedangkan pada Pencapaian kinerja, dapat diukur melalui pelaksanaan jumlah program yang dilakukan, Realisasi program, kegiatan dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa periode Renstra Tahun 2021-2026.

2.1.3.2. Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut:

Data Tabel 2.9
Indikator Kinerja Kunci
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Capaian Kinerja pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	%	100	100	100	100
2.	Persentase Capaian kinerja Peningkatan Peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100	100	100	100
3.	Persentase Capaian kinerja pemberdayaan dan pengawasan Ormas	%	100	100	100	100
4.	Presentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	%	NA	NA	NA	100
5.	Persentase capaian kinerja kewaspadaan dan penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100

Dari Tabel 2.9 diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang baik, dimana Presentase keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan target yang diharapkan.

1.1.3.3. Capaian Kinerja Layanan

Selain dari pelaksanaan program, ada juga Sub program/kegiatan yang menjadi barometer pelayanan publik atau penilaiannya berada pada masyarakat yang memperoleh pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, seperti pelayanan diberikan kepada (1) Mahasiswa (2) Ormas (3) Parpol, adapun pelayanan yang diberikan teraji pada data tabel dibawah ini:

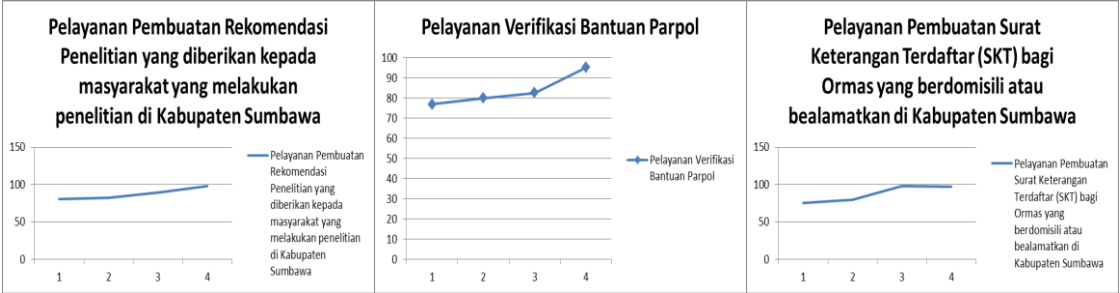
Data Tabel 2.10
Indeks Kepuasan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2024

Uraian	Satuan	Indek Kepuasan Masyarakat 2021-2024			
		2021	2022	2023	2024
Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan penelitian di Kabupaten Sumbawa	%	80.50	82.00	89.11	98.00
Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas yang berdomisili atau bealamatkan di Kabupaten Sumbawa	%	75.00	80.00	97.89	96.70
Pelayanan Verifikasi Bantuan Parpol	%	7.69	80.00	82.54	95.20

Pelayanan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel, dan dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan public guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dari data tabel 2.10 terkait Pelayanan yang diberikan dari tahun 2021 – 2024 dengan kategori rata-rata berada pada nilai 80 dan tergolong kategori baik dan juga dapat dilihat dalam betuk gambar grafik dibawah ini:

Gambar 2.5
Pelayanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa memiliki peran yang mencakup beberapa aspek, seperti aspek pendidikan, pengawasan, mediasi, dan kerjasama, Kesbangpol memiliki tanggung jawab penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, aspek tersebut merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di suatu daerah. Adapun kelompok sasaran pelayanan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa adalah:

2.1.4.1 Masyarakat

Pelayanan yang diberikan berupa pendidikan politik, pendidikan karakter kebangsaan dan pemahaman terhadap garis besar pancasila, mediasi terkait masalah, seperti mediasi antara masyarakat dan perusahaan (swasta) dan Kesbangpol berperan juga dalam mendorong dialog dan dialog antar-kelompok untuk mengatasi perbedaan dan membangun pemahaman yang saling menghormati antara berbagai kelompok dalam masyarakat serta kegiatan yang menghargai keragaman budaya, adat istiadat, dan kepercayaan agama, Melalui dialog yang konstruktif, Kesbangpol dapat membantu mengatasi ketegangan dan mencegah terjadinya konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda.

2.1.4.2 Swasta

Pelayanan yang diberikan oleh Kesbangpol Kabupaten Sumbawa kepada pihak swasta yaitu berupa negosiasi anatara pihak swasta dan masyarakat/kelompok masyarakat karena terjadinya sengketa dan biasanya sengketa yang terjadi berupa lahan, dimana lahan pihak swasta dikuasai oleh masyarakat.

2.1.4.3 Partai Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan leadingsector pencairan bantuan partai politik. Pemerintah telah mengalokasikan dana kepada sejumlah partai politik sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2.1.4.4 Pelajar/mahasiswa/mahasiswi/peneliti

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menerbitkan izin Rekomendasi Penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2.1.4.5 Organisasi Kemasyarakatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan fungsinya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selalu menjalin kemitraan dengan KPU, Bawaslu, Masyarakat/keompok masyarakat, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat yang memicu terjadinya konflik.

2.1.6. Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama antar daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, meliputi koordinasi dan pembinaan di bidang politik dalam negeri, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Kesbangpol juga berperan dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas berpolitik, dan fasilitasi kerukunan antar umat beragama. Secara umum, berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pembina dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain:

1. Pemerintah Pusat:

Kesbangpol juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu nasional yang berdampak pada daerah.

2. Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan keutuhan daerah. Kesbangpol perlu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lainnya.

3. Aparat Keamanan:

Kesbangpol perlu menjalin kerjasama yang erat dengan aparat keamanan, seperti kepolisian dan TNI, dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban serta penanganan konflik.

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Permasalahan dan Isu Strategis adalah bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis adalah masalah atau kondisi yang membutuhkan perhatian utama karena memiliki dampak signifikan bagi pembangunan. Isu-isu ini umumnya memiliki karakteristik seperti penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pembangunan daerah.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa memiliki Tugas dan Fungsi di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu Tanggung Jawab dalam melaksanakan tugas untuk Menumbuh Kembangkan Rasa Nasionalisme, Kesadaran Bernegara Dan Bela Negara demi terjaganya Keutuhan NKRI di Kabupaten Sumbawa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menjalankan fungsi tersebut dan tidak menutup kemungkinan Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa di Kabupaten Sumbawa di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya dan untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Mulai dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sumbawa pada khususnya.

Permasalahan daerah yang terinci dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah:

Kriminalitas, kejahatan dan konflik sosial/horizontal masih terjadi, meskipun dari waktu ke waktu cenderung semakin berkurang.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.

Permasalahan yang yang terkait langsung dengan pelayanan adalah sebagai berikut:

Data Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan
Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat	Kuatnya arus Globalisasi dan transportasi budaya	Kurangnya pembinaan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila ditengah-tengah masyarakat
2	Belum optimalnya partisipasi politik di masyarkat	Kesadaran Politik Masyarakat masih rendah	Kurangnya penyuluhan kesadaran politik masyarakat
3	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Banyak Organisasi masyarakat yang menyimpang dari fungsinya	Kurangnya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan
4	Masih tingginya penyebaran Narkotika dan Prekursor Narkotika	Belum optimalnya pencegahan dan penanganan P4GN Kab. Sumbawa	Kurangnya Sosialisasi dan Penanganan terhadap bahaya P4GN Kab. Sumbawa
5	Masih terdapatnya potensi konflik di masyarnakat	Banyaknya konflik yang terjadi dimasyarakat	Konflik antar masyarakat Ipoletksosbudhankam
6	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal. Sarana prasarana perangkat daerah masih kurang. Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau permasalahan yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak signifikan bagi suatu daerah. Isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis dan membantu dalam pengambilan keputusan. Difenisi yang lain juga mengatakan, bahwa Isu Strategis itu sendiri adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena berdampak signifikan bagi Daerah, hal ini dapat diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen serta yang menjadi isu strategis adalah memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa telah melakukan serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan yang ditinjau dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sumbawa pada, maka masalah- masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah:

Data Tabel 2.12
Tentang Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat	Kriminalitas, kejahatan dan konflik sosial/horizontal masih terjadi meskipun dari waktu ke waktu cenderung semakin berkurang		Ketegangan Geopolitik dan Ancaman terhadap Keamanan Global; Ketegangan antara negara-negara besar, seperti konflik di Ukraina, telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan global. Situasi ini mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan kerjasama multilateral, yang semuanya berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global.	Penguatan tata kelola politik dan demokrasi: Peningkatan indeks demokrasi dan hak asasi manusia, serta optimalisasi peran partai politik dalam sistem pemerintahan.	Peningkatan stabilitas keamanan wilayah: Penguatan sistem keamanan, penanganan konflik sosial, serta optimalisasi koordinasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban daerah.	Belum optimal pengelolaan nilai-nilai budaya dan keamanan belum optimal
Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan good governance Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, misalnya Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators(WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index).	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan publik. Desain organisasi perangkat daerah masih asimetris/belum bersifat afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Belum Optimal pengelolaan nilai-nilai budaya dan keamanan belum optimal .
2. Kualitas pengelolaan kinerja dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, berperan dalam meningkatkan Pencegahan Konflik Sosial guna menjaga Kondusifitas Wilayah, serta tata kelola birokrasi yang transformatif agar terwujud institusi pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang afirmatif terhadap isu Strategis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam menentukan tindakan terhadap guna pencapaian tujuan yang diinginkan, maka dikembangkan Nilai-nilai yang mendukung Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikenal dengan adalah PASTI, dengan uraian sebagai berikut:

1. **PROFESIONAL** : mencakup aspek-aspek keahlian, integritas, komunikasi efektif, responsif, dan komitmen untuk memberikan hasil terbaik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan program/kegiatan.
2. **AMANAHAH** : mencakup memberikan informasi yang akurat, menjaga kerahasiaan, dan bertindak demi kepentingan terbaik.
3. **SENYUM** : Senyum ini bukan hanya ekspresi wajah, tetapi juga merupakan bahasa tubuh yang menyampaikan pesan positif, keramahan, dan kesiapan untuk memberikan pelayanan publik.
4. **TANPA IMBALAN**: pelayanan diberikan secara cuma-cuma atau sesuai prosedur yang berlaku.

3.1. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan tujuan dari Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, adapun tujuan Renstra dari tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat”. Dengan indikator “Tingkat Pencegahan Konflik Sosial”. Tujuan ini merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Data Tabel 3.1
Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
	NSPK: Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi	RPJMD
	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalitas ASN dalam bertugas		Indeks Implenmentasi NSPK Manajemen ASN	
	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Skor hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	

3.2. Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menguatnya Ketahanan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Optimalnya Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Pancasila.
3. Meningkatkan Profesionalitas ASN PD
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD

Untuk lebih jelas terkait target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dari tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah kabup[aten sumbawa tahun 2025-2029, disajikan pada bentuk tabel 3.2 dan Tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.2
Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
Meningkatnya Kondusifitas Daerah		Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi		
	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik di Dearah	Tingkat Potensi Konflik yang diselesaikan	Persen	Jumlah Potensi Konflik yang diselesaikan pada Tahun N dibagi dengan Jumlah Potensi Konflik pada tahun N dikali 100%
	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)	Kategori	Indeks IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (AKIP) PD	Kategori	Nilai SAKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori SAKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.

TABEL 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
- Meningkatnya keamanan, kesadaran politik, dan demokrasi masyarakat - Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas	Meningkatnya Kondusifitas Daerah		Tingkat Pencegahan konflik politik dan demokrasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Indeks)	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
			Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
		Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik di Daerah	cakupan penanganan potensi konflik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kategori)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori AKIP PD (Kategori)	B	B	B	BB	BB	BB	A	

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini akan memperjelas pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi meliputi penetapan pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu 5623ahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Data Tabel 3.4
Pentahapan Pembangunan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

TUJUAN PD	TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)	MASA TRANSISI V (2030)
Prioritas Pembangunan secara Umum (General Priority)	Membangun landasan regulasi, data, dan sarana prasarana dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan kinerja utama dan kinerja kunci untuk pemenuhan target jangka menengah.	Diversifikasi dan pemanfaatan pelaksanaan urusan kominfotik-sandi	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target Renstra; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi.
Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat	Budaya & Keamanan: Perda budaya, festival tahunan, deteksi konflik sosial.	Budaya & Keamanan: Acara budaya tahunan, satgas anti-kenakalan remaja.	Budaya & Keamanan: Event budaya internasional, kriminalitas menurun.	Budaya & Keamanan: Ekosistem budaya kokoh, keamanan tinggi	Pada tahun 2030, sektor People difokuskan untuk mengevaluasi dan menyatukan hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan nilai budaya. Adanya tahun transisi memungkinkan penyesuaian kebijakan agar lebih selaras dengan RPJMD berikutnya, termasuk menampung rekomendasi dari evaluasi akhir di sektor SDM, pemuda, dan sosial budaya.	Di tahun 2030, Pemerintahan & Birokrasi Unggul difokuskan untuk mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai. Dengan masa transisi, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan struktur dan sistem pengelolaan keuangan agar siap memasuki periode Renstra berikutnya sesuai arahan RPJMD masaTransisi

	Profesionalisme ASN: Pemetaan jenis diklat teknis, manajerial dan sosio kultural	Profesionalisme ASN: Mengikut sertakan ASN PD dalam diklat teknis, manajerial dan sosio kultural	Profesionalisme ASN: Mengikut sertakan ASN PD dalam diklat berbasis kompetensi	Profesionalisme ASN: Peningkatan jumlah jabatan fungsional yang diisi ASN kompeten	Profesionalisme ASN: Pimpinan Tinggi bersertifikasi , reward dan punishment	Di tahun 2030, fokus Power adalah mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja. Dengan masa transisi, PD dapat mengoptimalkan sumberdaya PD, agar siap memasuki periode Renstra-PD baru tanpa kehilangan kemajuan yang sudah dicapai.
	Tata Kelola & RB: SOP layanan publik di Bakesbangpol, ePlanning & eBudgeting awal	Tata Kelola & RB: E-Gov (e-SAKIP) lebih sempurna, naikan nilai SAKIP OPD	Tata Kelola & RB: Target Nilai "BB" SAKIP Bakesbangpol dan perluasan e-pelayanan	Tata Kelola & RB: Target Nilai "BB" SAKIP Bakesbangpol dan e-Gov terintegrasi (SPBE)	Tata Kelola & RB: Nilai SAKIP Bakesbangpol min. "BB" (SAKIP)	

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada DataTabel 3.5 berikut.

Data Tabel 3.5
Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
Pencegahan konflik Politik dan Demokrasi untuk keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat	Menguatnya Ketahanan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Ormas dan Okmas Yang Mengikuti Pendidikan Karakter Kebangsaan
	Optimalnya Peningkatan Kesadaran Politik dan Demokrasi Pancasila	Cakupan Penyampaian Pendapat Publik Secara tertib dan Damai
Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten SumbawaTahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/ subkegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6

Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasiona- lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Keamanan, kesadaran politik dan demokrasi masyarakat	Menguatnya Ketahanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mengikuti Pendidikan Karakter Kebangsaan	1. Melaksanakan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui pelaksanaa pendidikan dan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. 2. Melaksanakan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui pedataan/pembuatan SKT, pembinaan, dan pengawasan 3. Melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 4. Melaksanakan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melalui pelaksanaan kewaspadaan dini, kerjasama intelegen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan forum pimpian daerah dalam peanganan konflik di daerah	Penguatan moderasi beragama dan toleransi di Masyarakat.
	Optimalnya Peningkata n Kesadaran Politik dan Demokrasi Pancasila.	Cakupan Peyampaian Pedapat PublikSecara Tertib dan Damai	Melaksanakan Program Peningkatan Peran Parpol dan Lemdik melalui Dikpol dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik melalui pelaksanaan survey idek demokrasi, fasilitasi Parpl, dan pengembangan etika budaya politik	Kolaborasi KPU/Bawaslu untuk penyuluhan pemilu partisipatif.
Tata Kelola manaje-men internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkat nya akuntabili tas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis OPD.
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi	Implementasi reward & punishment berbasis

Operasiona- lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
	Sumbawa		Keuangan	kinerja.
	Meningkat nya Profesiona litas ASN PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa	Meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengawasan internal dan penilaian kepuasan masyarakat berkala. Penyusunan Indikator Kinerja Utama di tiap OPD

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Merupakan kegiatan pembinaan, pemahaman dan pendidikan tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kepada okmas, ormas dan masyarakat.

2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Merupakan kegiatan pemberdayaan dengan melakukan sosialisasi kepada okmas, ormas yang telah melakukan/membuat Surat Keterangan Terdaftar/SKT pada Bakesbangpol Kab. Sumbawa dan melakukan pengawasan, guna mencegah adanya bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh okmas, ormas tersebut.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Merupakan kegiatan pemahaman/sosialisasi terkait P4GN/ pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Sumbawa dan melakukan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan merumuskan kebijakan tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya melalui akses informasi yang real dari publik agar kebijakan yang dirumuskan relevan dan sesuai kenyataan lapangan.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Merupakan kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam hal melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik.

5. Program Peningkatan Peran Parpol dan Lemdik melalui Dikpol dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Merupakan kegiatan peningkatan peran parpol dan lemdik melalui dikpol dan pengembangan etika serta budaya politik dengan cara melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Program ini meliputi kegiatan seperti administrasi umum perangkat daerah, administrasi keuangan dan operasional kantor serta pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan.

4.2 Uraian Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Uraian kegiatan merujuk pada penjabaran lebih lanjut dari suatu program, untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, dengan bentuk aktivitas yang lebih dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kegiatan-kegiatan tersebut harus sistematis dan untuk dapat melaksanakan program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik, serta mencapai target sasaran strategis, maka dilaksanakan beberapa Kegiatan. Kegiatan ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa untuk

merealisasikan program karena merupakan cerminan dari strategi kongkrit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.680.899.430,00		7.051.479.178,00		7.417.953.388,00		7.769.272.598,00		8.098.500.859,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.070.852.026,00		3.272.706.063,00		3.494.247.622,00		3.736.573.350,00		4.005.785.550,00	
Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IP-ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Poin)	72,37	73,80	75,24	41.200.000,00	76,68	59.900.695,00	78,12	60.000.000,00	79,56	72.478.840,00	81,00	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Badan Kesbangpol (Nilai)	63,87	66,56	69,25	3.029.652.026,00	71,94	3.212.805.368,00	74,63	3.434.247.622,00	77,32	3.664.094.510,00	80,01	3.930.785.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					500.104.750,00		500.665.000,00		501.298.263,00		502.014.938,00		502.826.960,00	
Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mengikuti pendidikan karakter kebangsaan (%)	100,00	100,00	100,00	500.104.750,00	100,00	500.665.000,00	100,00	501.298.263,00	100,00	502.014.938,00	100,00	502.826.960,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.282.341.881,00		1.333.635.556,00		1.373.644.623,00		1.401.117.515,00		1.415.128.691,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat	Cakupan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (%)	100,00	100,00	100,00	1.282.341.881,00	100,00	1.333.635.556,00	100,00	1.373.644.623,00	100,00	1.401.117.515,00	100,00	1.415.128.691,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					61.577.100,00		86.207.940,00		112.070.322,00		134.484.386,00		147.932.825,00	
Meningkatnya Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi (%)	100,00	100,00	100,00	61.577.100,00	100,00	86.207.940,00	100,00	112.070.322,00	100,00	134.484.386,00	100,00	147.932.825,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					60.000.000,00		84.000.000,00		109.200.000,00		131.040.000,00		144.144.000,00	
Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan Pembinaan	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mendapatkan pembinaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	60.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	109.200.000,00	100,00	131.040.000,00	100,00	144.144.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.706.023.673,00		1.774.264.619,00		1.827.492.558,00		1.864.042.409,00		1.882.682.833,00	
Meningkatnya kemampuan daerah dalam menangani ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) stabilitas daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100,00	100,00	100,00	1.706.023.673,00	100,00	1.774.264.619,00	100,00	1.827.492.558,00	100,00	1.864.042.409,00	100,00	1.882.682.833,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					6680899430.00		7051479178.00		7417953388.00		7769272598.00		8098500859.00	

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Indikator Kinerja, Target Kinerja Dan Pagu Indikatif

Penjabaran Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu Indikatif yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumbawa. Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa, maka uraian subkegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

**TABEL 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD
Pemerintah Kabupaten Sumbawa**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya keamanan, kesadaran politik, dan demokrasi masyarakat - Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas	Meningkatnya Kondusifitas Daerah				Tingkat Pencegahan konflik politik dan demokrasi (%)		
					Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Indeks)		
					Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)		
		Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik di Daerah	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan peningkatan Kapasitas		cakupan penanganan potensi konflik (%)		
					Cakupan Pokmas dan Ormas yang mengikuti pendidikan karakter kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
					Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat		Cakupan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
					Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan Pembinaan		Cakupan Pokmas dan Ormas yang mendapatkan pembinaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
					Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN PD	Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kategori)		
					IP-ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Poin)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Kategori AKIP PD (Kategori)		
					Nilai AKIP Badan Kesbangpol (Nilai)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	---	--	--

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.1. Subkegiatan yang diampuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa pada Tabel 4.2 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.2 yang terdiri dari :

1. Nama Subkegiatan :

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan untuk diampuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa pada Tabel 4.2 di atas, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

2. Lokasi Subkegiatan :

Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah dan entitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Perangkat Daerah (internal) Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan :

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat :

Pelaksanaan berbagai subkegiatan kegiatan melibatkan berbagai pihak sebagai berikut: Pemerintah Pusat TNI/Polri Kejaksaaan, Pengadilan,DPRD Kabupaten Sumbawa, Kantor Imigrasi, Pelajar, Ormas, Okmas, Toga Toma, BNN. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat Subkegiatan :

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat yaitu:

- pencegahan konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat di wilayah kabupaten sumbawa, serta dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Terjaganya fungsi dan kinerja BMD.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan/atau dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan tansisi tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.680.899.430,00		7.051.479.178,00		7.417.953.388,00		7.769.272.598,00		8.098.500.859,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.070.852.026,00		3.272.706.063,00		3.494.247.622,00		3.736.573.350,00		4.005.785.550,00		
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Badan Kesbangpol (Nilai)	63,87	69,25	3.029.652.026,00	71,94	3.212.805.368,00	74,63	3.434.247.622,00	77,32	3.664.094.510,00	80,01	3.930.785.550,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				82.424.088,00		89.262.190,00		93.700.000,00		94.801.000,00		97.100.000,00		
Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	82.424.088,00	1	89.262.190,00	1	93.700.000,00	1	94.801.000,00	1	97.100.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.665.700,00		45.000.000,00		46.000.000,00		46.501.000,00		47.000.000,00		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	40.665.700,00	2	45.000.000,00	2	46.000.000,00	2	46.501.000,00	2	47.000.000,00		
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.692.900,00		8.462.190,00		8.500.000,00		8.600.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.692.900,00	1	8.462.190,00	1	8.500.000,00	1	8.600.000,00	1	9.000.000,00		
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.983.050,00		6.000.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.983.050,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00	1	7.000.000,00		
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.184.050,00		7.000.000,00		7.500.000,00		7.600.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.184.050,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.600.000,00	1	8.000.000,00		
8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				7.616.050,00		7.800.000,00		8.000.000,00		8.100.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.616.050,00	1	7.800.000,00	1	8.000.000,00	1	8.100.000,00	1	8.500.000,00		
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.282.338,00		7.500.000,00		7.700.000,00		7.800.000,00		7.900.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	7.282.338,00	1	7.500.000,00	1	7.700.000,00	1	7.800.000,00	1	7.900.000,00		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000,00		7.500.000,00		9.500.000,00		9.600.000,00		9.700.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	9.500.000,00	1	9.600.000,00	1	9.700.000,00		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.533.295.570,00		2.541.921.607,00		2.591.600.000,00		2.716.552.157,00		2.796.400.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	1	2.533.295.570,00	1	2.541.921.607,00	1	2.591.600.000,00	1	2.716.552.157,00	1	2.796.400.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	21		21		21		21		21			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.451.680.570,00		2.451.680.600,00		2.500.000.000,00		2.624.352.157,00		2.700.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	21	2.451.680.570,00	21	2.451.680.600,00	21	2.500.000.000,00	21	2.624.352.157,00	21	2.700.000.000,00		
8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00		
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.775.000,00		4.780.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	4.775.000,00	1	4.780.000,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	6.500.000,00		
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4.000.000,00		5.997.996,00		6.000.000,00		6.100.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	1	4.000.000,00	1	5.997.996,00	1	6.000.000,00	1	6.100.000,00	1	6.500.000,00		
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.020.000,00		7.427.090,00		8.000.000,00		8.100.000,00		8.900.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.020.000,00	1	7.427.090,00	1	8.000.000,00	1	8.100.000,00	1	8.900.000,00		
8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				4.530.000,00		6.049.745,00		6.100.000,00		6.200.000,00		6.800.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4	4.530.000,00	4	6.049.745,00	4	6.100.000,00	4	6.200.000,00	4	6.800.000,00		

8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.160.000,00		5.947.383,00		6.000.000,00		6.100.000,00		6.700.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	5.160.000,00	4	5.947.383,00	4	6.000.000,00	4	6.100.000,00	4	6.700.000,00		
8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4.130.000,00		6.038.793,00		6.500.000,00		6.600.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	4.130.000,00	1	6.038.793,00	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00	1	7.000.000,00		
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.000.000,00		10.256.194,00		10.500.000,00		12.410.031,00		13.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	10.256.194,00	1	10.500.000,00	1	12.410.031,00	1	13.000.000,00		
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000,00		10.256.194,00		10.500.000,00		12.410.031,00		13.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	10.256.194,00	1	10.500.000,00	1	12.410.031,00	1	13.000.000,00		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				133.151.000,00		169.679.735,00		188.447.622,00		257.232.182,00		277.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	133.151.000,00	1	169.679.735,00	1	188.447.622,00	1	257.232.182,00	1	277.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.000.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00		19.100.000,00		21.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	18.000.000,00	1	18.500.000,00	1	19.000.000,00	1	19.100.000,00	1	21.000.000,00		

8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		31.000.000,00		35.000.000,00		35.500.000,00		36.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.500.000,00	1	36.000.000,00		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.500.000,00		6.049.381,00		7.000.000,00		7.319.751,00		8.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.500.000,00	1	6.049.381,00	1	7.000.000,00	1	7.319.751,00	1	8.500.000,00		
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.900.000,00		6.666.000,00		7.000.000,00		8.065.860,00		8.500.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	4.900.000,00	12	6.666.000,00	12	7.000.000,00	12	8.065.860,00	12	8.500.000,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.400.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	1.400.000,00	12	2.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.500.000,00	12	5.000.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				69.769.000,00		100.464.354,00		111.447.622,00		175.746.571,00		190.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	69.769.000,00	12	100.464.354,00	12	111.447.622,00	12	175.746.571,00	12	190.000.000,00		
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.582.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	4.582.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.885.868,00		150.000.000,00		180.000.000,00		195.599.140,00		220.285.550,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	95.885.868,00	4	150.000.000,00	4	180.000.000,00	5	195.599.140,00	5	220.285.550,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3		4		5		6		6			
8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		119.585.550,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	2	50.000.000,00	4	85.000.000,00	4	90.000.000,00	5	95.000.000,00	5	119.585.550,00		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.885.868,00		65.000.000,00		90.000.000,00		100.599.140,00		100.700.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	3	45.885.868,00	4	65.000.000,00	5	90.000.000,00	6	100.599.140,00	6	100.700.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				63.388.500,00		67.000.000,00		70.000.000,00		72.500.000,00		77.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	63.388.500,00	1	67.000.000,00	1	70.000.000,00	1	72.500.000,00	1	77.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21.500.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		23.500.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	21.500.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.500.000,00	12	25.000.000,00		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				16.300.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	16.300.000,00	4	17.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00	4	20.000.000,00		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.879.500,00		19.000.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	16.879.500,00	1	19.000.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.709.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	8.709.000,00	1	9.000.000,00	1	9.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.507.000,00		184.685.642,00		300.000.000,00		315.000.000,00		450.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	115.507.000,00	-	184.685.642,00	-	300.000.000,00	-	315.000.000,00	-	450.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-		-		-		-		-			
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				65.507.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	65.507.000,00	5	90.000.000,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	5	200.000.000,00		
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		94.685.642,00		200.000.000,00		210.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	50.000.000,00	1	94.685.642,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	250.000.000,00		

8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Poin)	IP-ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Poin)	72,37	75,24	41.200.000,00	76,68	59.900.695,00	78,12	60.000.000,00	79,56	72.478.840,00	81,00	75.000.000,00		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41.200.000,00		59.900.695,00		60.000.000,00		72.478.840,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	41.200.000,00	1	59.900.695,00	1	60.000.000,00	1	72.478.840,00	1	75.000.000,00		
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				41.200.000,00		59.900.695,00		60.000.000,00		72.478.840,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	41.200.000,00	1	59.900.695,00	1	60.000.000,00	1	72.478.840,00	1	75.000.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				500.104.750,00		500.665.000,00		501.298.263,00		502.014.938,00		502.826.960,00		
Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mengikuti pendidikan karakter kebangsaan (%)	100,00	100,00	500.104.750,00	100,00	500.665.000,00	100,00	501.298.263,00	100,00	502.014.938,00	100,00	502.826.960,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				500.104.750,00		500.665.000,00		501.298.263,00		502.014.938,00		502.826.960,00		
Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	-	-	500.104.750,00	-	500.665.000,00	-	501.298.263,00	-	502.014.938,00	-	502.826.960,00		
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)													
	Jumlah Paskibraka (Orang)	0	31		31		31		31		31			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	-	-		-		-		-		-			-

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	155	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	155	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				500.104.750,00		500.665.000,00		501.298.263,00		502.014.938,00		502.826.960,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	0	31	500.104.750,00	31	500.665.000,00	31	501.298.263,00	31	502.014.938,00	31	502.826.960,00		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				0		0		0		0		0		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)			0		0		0		0		0		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.282.341.881,00		1.333.635.556,00		1.373.644.623,00		1.401.117.515,00		1.415.128.691,00		
Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat	Cakupan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (%)	100,00	100,00	1.282.341.881,00	100,00	1.333.635.556,00	100,00	1.373.644.623,00	100,00	1.401.117.515,00	100,00	1.415.128.691,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.282.341.881,00		1.333.635.556,00		1.373.644.623,00		1.401.117.515,00		1.415.128.691,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	-	-	1.282.341.881,00	-	1.333.635.556,00	-	1.373.644.623,00	-	1.401.117.515,00	-	1.415.128.691,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	-	-		-		-		-		-		
8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.282.341.881,00		1.333.635.556,00		1.373.644.623,00		1.401.117.515,00		1.415.128.691,00	

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100	1.282.341.881,00	100	1.333.635.556,00	100	1.373.644.623,00	100	1.401.117.515,00	100	1.415.128.691,00		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				61.577.100,00		86.207.940,00		112.070.322,00		134.484.386,00		147.932.825,00		

Meningkatnya Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi (%)	100,00	100,00	61.577.100,00	100,00	86.207.940,00	100,00	112.070.322,00	100,00	134.484.386,00	100,00	147.932.825,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				61.577.100,00		86.207.940,00		112.070.322,00		134.484.386,00		147.932.825,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	61.577.100,00	50	86.207.940,00	50	112.070.322,00	50	134.484.386,00	50	147.932.825,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	-	-											
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	-	-											
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-											
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-											
8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				61.577.100,00		86.207.940,00		112.070.322,00		134.484.386,00		147.932.825,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	61.577.100,00	50	86.207.940,00	50	112.070.322,00	50	134.484.386,00	50	147.932.825,00		
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				60.000.000,00		84.000.000,00		109.200.000,00		131.040.000,00		144.144.000,00		
Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan Pembinaan	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mendapatkan pembinaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (%)	100,00	100,00	60.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	109.200.000,00	100,00	131.040.000,00	100,00	144.144.000,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan	

8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				60.000.000,00		84.000.000,00		109.200.000,00		131.040.000,00		144.144.000,00	Bangsa dan Politik	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	-	-	60.000.000,00	-	84.000.000,00	-	109.200.000,00	-	131.040.000,00	-	144.144.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				60.000.000,00		84.000.000,00		109.200.000,00		131.040.000,00		144.144.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50	60.000.000,00	50	84.000.000,00	50	109.200.000,00	50	131.040.000,00	50	144.144.000,00		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		

8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.706.023.673,00		1.774.264.619,00		1.827.492.558,00		1.864.042.409,00		1.882.682.833,00		
Meningkatnya kemampuan daerah dalam menangani ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) stabilitas daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100,00	100,00	1.706.023.673,00	100,00	1.774.264.619,00	100,00	1.827.492.558,00	100,00	1.864.042.409,00	100,00	1.882.682.833,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.706.023.673,00		1.774.264.619,00		1.827.492.558,00		1.864.042.409,00		1.882.682.833,00		
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	45	1.706.023.673,00	45	1.774.264.619,00	45	1.827.492.558,00	45	1.864.042.409,00	45	1.882.682.833,00		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	27	27		27		27		27		27			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-		-		-		-		-			
8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				127.778.423,00		150.525.405,00		167.525.405,00		179.525.405,00		179.525.405,00		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	27	27	127.778.423,00	27	95 150.525.405,00	27	167.525.405,00	27	179.525.405,00	27	179.525.405,00		
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200.000.000,00		222.746.982,00		248.974.921,00		263.524.772,00		282.165.196,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	45	200.000.000,00	45	222.746.982,00	45	248.974.921,00	45	263.524.772,00	45	282.165.196,00		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1.378.245.250,00		1.400.992.232,00		1.410.992.232,00		1.420.992.232,00		1.420.992.232,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	1.378.245.250,00	2	1.400.992.232,00	2	1.410.992.232,00	2	1.420.992.232,00	2	1.420.992.232,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.680.899.430,00		7.051.479.178,00		7.417.953.388,00		7.769.272.598,00		8.098.500.859,00			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.070.852.026,00		3.272.706.063,00		3.494.247.622,00		3.736.573.350,00		4.005.785.550,00			
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai AKIP Badan Kesbangpol (Nilai)	63,87	66,56	69,25	3.029.652.026,00	71,94	3.212.805.368,00	74,63	3.434.247.622,00	77,32	3.664.094.510,00	80,01	3.930.785.550,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					82.424.088,00		89.262.190,00		93.700.000,00		94.801.000,00		97.100.000,00			
Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	82.424.088,00	1	89.262.190,00	1	93.700.000,00	1	94.801.000,00	1	97.100.000,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					40.665.700,00		45.000.000,00		46.000.000,00		46.501.000,00		47.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	40.665.700,00	2	45.000.000,00	2	46.000.000,00	2	46.501.000,00	2	47.000.000,00			
8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.692.900,00		8.462.190,00		8.500.000,00		8.600.000,00		9.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.692.900,00	1	8.462.190,00	1	8.500.000,00	1	8.600.000,00	1	9.000.000,00			
8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.983.050,00		6.000.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		7.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	5.983.050,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00	1	7.000.000,00			
8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					6.184.050,00		7.000.000,00		7.500.000,00		7.600.000,00		8.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	6.184.050,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.600.000,00	1	8.000.000,00			
8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.616.050,00		7.800.000,00		8.000.000,00		8.100.000,00		8.500.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.616.050,00	1	7.800.000,00	1	8.000.000,00	1	8.100.000,00	1	8.500.000,00			
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7.282.338,00		7.500.000,00		7.700.000,00		7.800.000,00		7.900.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	7.282.338,00	1	7.500.000,00	1	7.700.000,00	1	7.800.000,00	1	7.900.000,00			

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00			
8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4.775.000,00		4.780.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		6.500.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.775.000,00	1	4.780.000,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	6.500.000,00			
8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					4.000.000,00		5.997.996,00		6.000.000,00		6.100.000,00		6.500.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-	1	4.000.000,00	1	5.997.996,00	1	6.000.000,00	1	6.100.000,00	1	6.500.000,00			
8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.020.000,00		7.427.090,00		8.000.000,00		8.100.000,00		8.900.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	5.020.000,00	1	7.427.090,00	1	8.000.000,00	1	8.100.000,00	1	8.900.000,00			
8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					4.530.000,00		6.049.745,00		6.100.000,00		6.200.000,00		6.800.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	4	4	4.530.000,00	4	6.049.745,00	4	6.100.000,00	4	6.200.000,00	4	6.800.000,00			
8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					5.160.000,00		5.947.383,00		6.000.000,00		6.100.000,00		6.700.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	4	5.160.000,00	4	5.947.383,00	4	6.000.000,00	4	6.100.000,00	4	6.700.000,00			
8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					4.130.000,00		6.038.793,00		6.500.000,00		6.600.000,00		7.000.000,00		KAB. SUMBAWA	

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	4.130.000,00	1	6.038.793,00	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00	1	7.000.000,00			
8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.000.000,00		10.256.194,00		10.500.000,00		12.410.031,00		13.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	6.000.000,00	1	10.256.194,00	1	10.500.000,00	1	12.410.031,00	1	13.000.000,00			
8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					6.000.000,00		10.256.194,00		10.500.000,00		12.410.031,00		13.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	6.000.000,00	1	10.256.194,00	1	10.500.000,00	1	12.410.031,00	1	13.000.000,00			
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					133.151.000,00		169.679.735,00		188.447.622,00		257.232.182,00		277.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	133.151.000,00	1	169.679.735,00	1	188.447.622,00	1	257.232.182,00	1	277.000.000,00			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					18.000.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00		19.100.000,00		21.000.000,00		KAB. SUMBAWA	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	18.000.000,00	1	18.500.000,00	1	19.000.000,00	1	19.100.000,00	1	21.000.000,00			
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					30.000.000,00		31.000.000,00		35.000.000,00		35.500.000,00		36.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	30.000.000,00	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.500.000,00	1	36.000.000,00			
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.500.000,00		6.049.381,00		7.000.000,00		7.319.751,00		8.500.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	4.500.000,00	1	6.049.381,00	1	7.000.000,00	1	7.319.751,00	1	8.500.000,00			
8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.900.000,00		6.666.000,00		7.000.000,00		8.065.860,00		8.500.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	4.900.000,00	12	6.666.000,00	12	7.000.000,00	12	8.065.860,00	12	8.500.000,00			
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					1.400.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	1.400.000,00	12	2.000.000,00	12	3.000.000,00	12	4.500.000,00	12	5.000.000,00			
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					69.769.000,00		100.464.354,00		111.447.622,00		175.746.571,00		190.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	69.769.000,00	12	100.464.354,00	12	111.447.622,00	12	175.746.571,00	12	190.000.000,00			
8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					4.582.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.582.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00			
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					95.885.868,00		150.000.000,00		180.000.000,00		195.599.140,00		220.285.550,00			
Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	2	95.885.868,00	4	150.000.000,00	4	180.000.000,00	5	195.599.140,00	5	220.285.550,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	-	3		4		5		6		6				

8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					50.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		119.585.550,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	-	2	50.000.000,00	4	85.000.000,00	4	90.000.000,00	5	95.000.000,00	5	119.585.550,00			
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.885.868,00		65.000.000,00		90.000.000,00		100.599.140,00		100.700.000,00		Lunyuk , KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	-	3	45.885.868,00	4	65.000.000,00	5	90.000.000,00	6	100.599.140,00	6	100.700.000,00			
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.388.500,00		67.000.000,00		70.000.000,00		72.500.000,00		77.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	63.388.500,00	1	67.000.000,00	1	70.000.000,00	1	72.500.000,00	1	77.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					21.500.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		23.500.000,00		25.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	21.500.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.500.000,00	12	25.000.000,00			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					16.300.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	4	16.300.000,00	4	17.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00	4	20.000.000,00			
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					16.879.500,00		19.000.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	16.879.500,00	1	19.000.000,00	1	19.500.000,00	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00			

8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					8.709.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		Lunyak	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	8.709.000,00	1	9.000.000,00	1	9.500.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00			
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.507.000,00		184.685.642,00		300.000.000,00		315.000.000,00		450.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	5	115.507.000,00	5	184.685.642,00	5	300.000.000,00	5	315.000.000,00	5	450.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	1		1		1		1		1				
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					65.507.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		200.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	5	65.507.000,00	5	90.000.000,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	5	200.000.000,00			
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.000.000,00		94.685.642,00		200.000.000,00		210.000.000,00		250.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	1	50.000.000,00	1	94.685.642,00	1	200.000.000,00	1	210.000.000,00	1	250.000.000,00			

8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Lunyak	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IP-ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Poin)	72,37	73,80	75,24	41.200.000,00	76,68	59.900.695,00	78,12	60.000.000,00	79,56	72.478.840,00	81,00	75.000.000,00			
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					41.200.000,00		59.900.695,00		60.000.000,00		72.478.840,00		75.000.000,00			
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	41.200.000,00	1	59.900.695,00	1	60.000.000,00	1	72.478.840,00	1	75.000.000,00			
8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					41.200.000,00		59.900.695,00		60.000.000,00		72.478.840,00		75.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	41.200.000,00	1	59.900.695,00	1	60.000.000,00	1	72.478.840,00	1	75.000.000,00			
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					500.104.750,00		500.665.000,00		501.298.263,00		502.014.938,00		502.826.960,00			
Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mengikuti pendidikan karakter kebangsaan (%)	100,00	100,00	100,00	500.104.750,00	100,00	500.665.000,00	100,00	501.298.263,00	100,00	502.014.938,00	100,00	502.826.960,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					500.104.750,00		500.665.000,00		501.298.263,00		502.014.938,00		502.826.960,00			

[illegible]

8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Lunyak	
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					0		0		0		0		0			
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)				0		0		0		0		0			
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.282.341.881,00		1.333.635.556,00		1.373.644.623,00		1.401.117.515,00		1.415.128.691,00			
Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat	Cakupan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (%)	100,00	100,00	100,00	1.282.341.881,00	100,00	1.333.635.556,00	100,00	1.373.644.623,00	100,00	1.401.117.515,00	100,00	1.415.128.691,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					1.282.341.881,00		1.333.635.556,00		1.373.644.623,00		1.401.117.515,00		1.415.128.691,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	100	100	100	1.282.341.881,00	100	1.333.635.556,00	100	1.373.644.623,00	100	1.401.117.515,00	100	1.415.128.691,00			

	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	-	-	-		-		-		-		-				

[illegible]

[illegible]

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					61.577.100,00		86.207.940,00		112.070.322,00		134.484.386,00		147.932.825,00			
Meningkatnya Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi (%)	100,00	100,00	100,00	61.577.100,00	100,00	86.207.940,00	100,00	112.070.322,00	100,00	134.484.386,00	100,00	147.932.825,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					61.577.100,00		86.207.940,00		112.070.322,00		134.484.386,00		147.932.825,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	61.577.100,00	-	86.207.940,00	-	112.070.322,00	-	134.484.386,00	-	147.932.825,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	50	50	50		50		50		50		50				

[illegible]

[illegible]

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					60.000.000,00		84.000.000,00		109.200.000,00		131.040.000,00		144.144.000,00			
Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan Pembinaan	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mendapatkan pembinaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	60.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	109.200.000,00	100,00	131.040.000,00	100,00	144.144.000,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					60.000.000,00		84.000.000,00		109.200.000,00		131.040.000,00		144.144.000,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	60.000.000,00	-	84.000.000,00	-	109.200.000,00	-	131.040.000,00	-	144.144.000,00			
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-				

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50	50		50		50		50		50				

[illegible]

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.706.023.673,00		1.774.264.619,00		1.827.492.558,00		1.864.042.409,00		1.882.682.833,00			
Meningkatnya kemampuan daerah dalam menangani ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) stabilitas daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100,00	100,00	100,00	1.706.023.673,00	100,00	1.774.264.619,00	100,00	1.827.492.558,00	100,00	1.864.042.409,00	100,00	1.882.682.833,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					1.706.023.673,00		1.774.264.619,00		1.827.492.558,00		1.864.042.409,00		1.882.682.833,00			
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	1.706.023.673,00	-	1.774.264.619,00	-	1.827.492.558,00	-	1.864.042.409,00	-	1.882.682.833,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	27	27	27		27		27		27		27				

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	-	45	45		45		45		45		45				
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	-	-		-		-		-		-				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				

8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					127.778.423,00		150.525.405,00		167.525.405,00		179.525.405,00		179.525.405,00		KAB. SUMBAWA	
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--------------	--

[illegible]

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					1.378.245.250,00		1.400.992.232,00		1.410.992.232,00		1.420.992.232,00		1.420.992.232,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	1.378.245.250,00	2	1.400.992.232,00	2	1.410.992.232,00	2	1.420.992.232,00	2	1.420.992.232,00			

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Tingkat Pencegahan konflik politik dan demokrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
2	Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Angka	3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	63,87	66,56	69,25	71,94	74,63	77,32	80,01	
3	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mengikuti pendidikan karakter kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Cakupan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Cakupan Pokmas dan Ormas yang mendapatkan pembinaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	IP-ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Poin	72,37	73,80	75,24	76,68	78,12	79,56	81,00	

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Daerah

Program prioritas adalah kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah sebagai fokus utama pembangunan nasional atau daerah dalam periode tertentu. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama dan mendukung visi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan pendukung dari program prioritas pembangunan daerah. , disajikan pada Data Tabel 4.4 berikut.

Data Tabel 4.4

Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai nilai-nilai kebangsaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah kabupaten sumbawa	Pendukung
			Pembentukan Paskibraka	Pembentukan pasukan Paskibraka yang telah di seleksi dan berasal dari SLTA/MAN/SMK/Se derajat	
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Mebuat SKT, Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Okmas/Okmas, memediasi apabila teradi sengketa antara Okmas/Okmas.	Pendukung
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	mendukung pencegahan penyalagunaan narkotika, memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama dan	Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
		dan Budaya.	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	penghayat kepercayaan	
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Pembentukan TIM Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Pendukung
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Pembentukan TIM Penanganan Konflik di Daerah	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	TIM Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Daerah Kabupaten/Kota.		
5	Peningkatan Peran Parpol dan Lembaga Pendidikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	memberikan Pendidikan tentang politik, etika budaya politik dan memfasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, yang menerima bantuan/hibah serta pemantauan situasi politik	Pendukung
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Evaluasi Kinerja PD	melaksanakan evaluasi kinerja PD sebagai bahan perencanaan	Penunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Menyusun dokumen perencanaan PD baik tahunan maupun jangka menengah	Penunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyusun dokumen RKA-SKPD sebagai rencana kegiatan dan anggraan.	Penunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebagai rencana kegiatan dan anggraan	Penunjang
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusun DPA-SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggraan	Penunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Perubahan DPA-SKPD sebagai acuan pelaksanaan	Penunjang

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
				kegiatan dan anggraan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang
		Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penunjang
		Kegiatan Administrasi BMD pada PD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Menyusun Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Penunjang
		Administrasi Umum PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penunjang
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan	Penunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparaturnya.	Penunjang

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat	Penunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Penunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Penunjang
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Menyediaan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penunjang

TABEL 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra
Pemerintah Kabupaten Sumbawa

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			8.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			8.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			8.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			8.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			8.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			8.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			8.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			8.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			8.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			8.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

			8.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		8.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
		8.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
		8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		
		8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		8.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
		8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

			8.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.2.01.0011 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
3.	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik masyarakat	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
			8.01.03.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.03.2.01.0006 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
4.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Cakupan Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	

			Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
5.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Pokmas dan Ormas yang mendapatkan Pembinaan	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
6.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kemampuan daerah dalam menangani ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) stabilitas daerah	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasarann Restra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi pemerintah daerah. IKU digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun defiisi lain dari Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan dan sesuai dengan target yang direncanakan. Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam DataTabel berikut:

4.6. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasarann Restra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK membantu mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan digunakan untuk mengelola kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan bidang kesatuan bangsa dan politik adalah berikut.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

[illegible]

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan, Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang diturunkan dalam Program Perangkat Daerah dan, disusun dengan mempertimbangkan potensi dan masalah sumber daya perangkat daerah, serta isu strategis global, nasional dan regional, dan acuan/landasan untuk menentukan arah, kebijakan Perangkat Daerah. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, maka Renstra dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaiannya, hal ini dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan sesuai amanat dari undang-undang serta regulasi yang berlaku.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 tetap merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan sepenuhnya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dilaksanakan secara akuntabel yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan. Terlaksananya seluruh yang direncanakan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang baik, cepat dan akurat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus

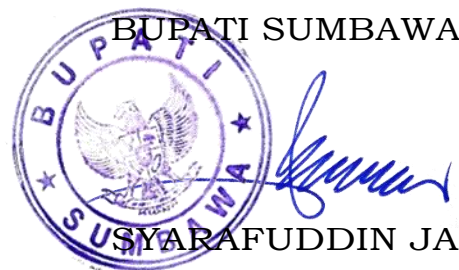
memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa. Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Kabupaten Sumbawa dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Konsistensi dan efektivitas dalam realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, dimana Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa melakukan control sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan rujukan atau yang pedoman dalam penyusunan/pembuatan Rencana kerja pada masa transisi dan juga restra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembangunan yang belum tercover dan problema yang dihadapi saat awal priode renstra ini.

BUPATI SUMBAWA,

 SYARAFUDDIN JAROT